



**RENCANA KERJA
Dinas Lingkungan Hidup
(RENJA - DLH)**

TAHUN 2021



KABUPATEN MINAHASA

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa kerana atas pimpinan dan tuntunan tanganNya penyusunan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Minahasa Tahun 2021 dapat diselesaikan.

Penyusunan RENJA tahun anggaran 2021 sebagai implementasi dari Undang-undang Nomor 25 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, sebagai landasan operasional Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah yang disinergikan dengan Permendagri Nomor 86 tahun 2017.

Terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan RENJA tahun anggaran 2021.



DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Landasan Hukum	2
C. Maksud dan Tujuan	5
D. Sistematika Penulisan	6
II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA-SKPD TAHUN LALU	7
A. Evaluasi Pelaksanaan RENJA-OPD Tahun Lalu Dan Capaian RENSTRA-OPD	7
B. Analisis Kinerja Pelayanan OPD	9
C. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD	10
D. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	14
E. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	14
III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	17
A. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	17
B. Tujuan dan Sasaran RENJA OPD	18
C. Program dan Kegiatan	19
VI. PENUTUP	21
LAMPIRAN	

BAB. I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG.

Peraturan dan perundangan di era desentralisasi memperlihatkan komitmen politik pemerintah untuk menata kembali dan meningkatkan sistem, mekanisme, prosedur dan kualitas proses perencanaan dan penganggaran daerah. Ini dilakukan dengan tujuan untuk mewujudkan tata kelolah pemerintah daerah yang lebih baik, demokratis dan pembangunan daerah berkelanjutan.

Dalam peraturan dan perundangan baru, penyusunan rencana dikehendaki memadukan pendekatan teknokratis, demokratis, partisipatif, politis, bottom-up dan top down process. Ini bermakna bahwa perencanaan daerah selain diharapkan memenuhi kaidah penyusunan rencana yang sistematis, terpadu, transparan dan akuntabel, konsisten dengan rencana lainnya yang relevan, juga kepemilikan rencana (*sense of ownership*) menjadi aspek yang perlu diperhatikan. Keterlibatan stakeholder dan legislative dalam proses pengambilan keputusan perencanaan menjadi sangat penting untuk memastikan rencana yang disusun mendapatkan dukungan optimal bagi implementasinya.

RENJA-PD atau Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan satu dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan bagi mengarahkan program dan kegiatan pelayanan PD khususnya dan pembangunan tahunan daerah pada umumnya. Sebagai suatu dokumen rencanan resmi yang penting, sudah sepatutnya Pemerintah Daerah, DPRD dan masyarakat memberikan perhatian penting pada kualitas proses penyusunan dokumen RENJA-PD dan tentunya diikuti dengan pemantauan, evaluasi dan review berkala atas implementasinya.

RENJA-PD mempunyai fungsi penting dan sangat fundamental dalam sistem perencanaan daerah karena RENJA-PD adalah perencanaan pada unit

organisasi terendah dan terkecil di pemerintah daerah yang memberikan masukan utama dan mendasar bagi perencanaan di peringkat yang lebih atas seperti RKPD, Renstra PD, RPJMD dan bahkan RPJPD. RENJA-PD berhubungan langsung dengan pelayanan kepada masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kualitas penyusunan Renja PD dengan demikian akan sangat menentukan kualitas pelayanan PD yang diberikan kepada masyarakat penggunaannya.

B. LANDASAN HUKUM.

Penyusunan Renja PD perlu mengembangkan hubungan di antara peraturan dan perundangan sehingga RENJA-PD sebagai dokumen rencana tahunan muda diterjemahkan ke dalam KUA-APBD, SKA-SKPD dan APBD.

Terdapat 11 (Sebelas) landasan hukum utama yang mengatur sistem, mekanisme, proses dan prosedur tentang Renja PD khususnya dan perencanaan dan penganggaran daerah pada umumnya di era desentralisasi ini, yaitu :

1. Undang-undang No. 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN).
2. Undang-undang No. 17/2003 tentang Keuangan Negara.
3. Undang-undang No. 32/2004 tentang Pemerintah Daerah.
4. Undang-undang No. 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
5. Undang-undang No. 58/2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
6. Peraturan Pemerintah No. 65/2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 6/2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal
8. SEB Menteri Negara Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan Menteri Dalam Negeri 0008/M.PPN/01/2007/050/264A/SJ tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Musrebang Tahun 2007

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13/2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86/2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah dan Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
11. Permendagri No. 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Minahasa dibentuk sebagai implemtasi Peraturan Daerah Nomor : 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Minahasa. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa diatas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Minahasa dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang bertanggung jawab kapada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Di bawah Kepala Dinas terdapat Kelompok Jabatan Fungsional, seorang Sekretaris Dinas dan Tiga Kepala Bidang. Sekretaris membawahi Dua Kepala Sub Bagian, masing-masing Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan, Kepala Sub Bagian Program, Keuangan dan Pelaporan. Tiga Kepala Bidang yaitu: Kepala Bidang Penataan dan Pnaatan yang membawahi Kepala Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan, Kepala Seksi Penegakan Hukum Lingkungan dan Kepala Seksi Pengaduan dan Sengketa Lingkungan; Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan yang membawahi Kepala Seksi Pencemaran Lingkungan, Kepala Seksi Pemeliharaan Lingkungan dan Kepala Seksi Kerusakan Lingkungan serta Kepala Bidang Pengelolaan Sampah B3 dan Peningkatan Kapasitas yang membawahi Kepala Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, Kepala Seksi Pengelolaan Sampah dan Kebersihan dan Kepala Seksi Limbah B3 dan Laboratorium

Berdasarkan Peraturan Bupati Minahasa Nomor 54 Tahun 2016 tentang Penetapan Kedudukan Susunan Organisasi Satuan Kerja dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup; Tugas yang diemban Dinas Lingkungan

Hidup adalah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah serta tugas pembantuan di Bidang Lingkungan Hidup yang menjadi kewenangan daerah yang diserahkan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah.

Sedangkan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Minahasa seperti yang ditetapkan berdasarkan keputusan tersebut di atas adalah :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup
2. Pelaksanaan pembinaan kewenangan di bidang lingkungan hidup
3. Pengendalian dampak lingkungan.
4. Inventarisasi data dan informasi sumber daya alam.
5. Koordinasi penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan.
6. Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah.
7. Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Daerah.
8. Koordinasi penyusunan instrument pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (AMDAL, UKL-UPL, Izin Lingkungan, Audit LH, Analisis Resiko LH).
9. Penilaian terhadap dokumen lingkungan (AMDAL dan UKL-UPL).
10. Pelaksanaan proses izin lingkungan, pengelolaan sampah dan kebersihan.
11. Pelaksanaan penegakan hukum atas pelanggaran Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
12. Penyusunan informasi dan pengelolaan sampah tingkat kabupaten;.
13. Koordinasi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan pemroses akhir sampah;
14. Perumusan kebijakan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah diselenggarakan oleh swasta;
15. Pelaksanaan perizinan, pemantauan dan pengawasan penyimpanan sementara limbah B3 dalam satu daerah kabupaten;
16. Pelaksanaan pemantauan kualitas air, udara, tanah/tutupan lahan serta pesisir dan laut;
17. Pelaksanaan pemulihan dan penanggulangan pencemaran (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) sumber pencemar institusi dan non institusi;

18. Pelaksanaan perlindungan sumber daya alam;
19. Perencanaan, penetapan dan pemantauan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati;
20. Pembinaan dan pengawasan Standart Nasional Indonesia dan Standart Kompetensi Personil Bidang Lingkungan hidup;
21. Pemberian pelayanan lingkungan hidup;
22. Penyediaan laboratorium;
23. Pelaksanaan Pendidikan dan pelatihan di bidang lingkungan hidup;
24. Pelaksanaan pengawasan dan evaluasi kegiatan;
25. Penyusunan dan penyampaian laporan.

C. MAKSUD DAN TUJUAN.

Penyusunan RENJA -PD Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Minahasa di maksudkan untuk menjadi dasar penyusunan Rencana Pembangunan di atasnya (RKPD Tahunan). RENJA-PD merupakan gambaran yang sistematik, terpadu, dan ekuntabel tentang program dan kegiatan yang direncanakan PD untuk tahun kedepan dan merupakan evaluasi pada tahun kerja yang telah lewat.

Sedangkan tujuan dari RENJA-PD adalah;

1. Untuk dapat mengevaluasi pencapaian kinerja PD di tahun yang telah lewat.
2. Untuk memberikan masukan utama bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
3. Sebagai masukan utama pada penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-PD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD)

D. SISTEMATIKA PENULISAN.

- Bab I : Pendahuluan
 - A. Latar Belakang
 - B. Landasan Hukum
 - C. Maksud dan Tujuan
 - D. Sistematika Penulisan
- Bab II : hasil Evaluasi Pelaksanaan RENJA-PD Tahun Lalu
 - A. Evaluasi Pelaksanaan RENJA-PD Tahun Lalu dan Capaian RENSTRA-PD
 - B. Analisis Kinerja Pelayanan PD
 - C. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD
 - D. Review Terhadap Rancangan Awal PD
 - E. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
- Bab III : Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan
 - A. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
 - B. Tujuan dan Sasaran RENJA-PD
 - C. Program dan Kegiatan
- Bab IV : Penutup

BAB. II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD

TAHUN LALU

A. Evaluasi Pelaksanaan RENJA-PD tahun Lalu dan Capaian RENSTRA-PD

Secara umum pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun anggaran 2019 dan 2020 dapat terealisasi dengan capaian kinerja memuaskan hal ini dapat dilihat dari hasil pencapaian indikator kinerja Program dan kegiatan memenuhi hasil yang diharapkan.

Dalam pencapaian indikator kinerja program dan kegiatan sepantasnya memperhatikan masukan (pagu anggaran) keluaran (Hasil Kegiatan) serta Dampak (Hasil Program). Sehingga sangatlah penting setiap program dan kegiatan yang direncanakan pada tahun anggaran bersangkutan mendapatkan penganggaran sehingga indikator kinerja dapat terevaluasi dengan baik.

Untuk tahun 2019 program dan kegiatan yang dilaksanakan adalah :

1. Program pelayanan administrasi perkantoran.
2. Program peningkatan prasaranan dan sarana aparatur.
3. Program peningkatan disiplin aparatur.
4. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur.
5. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan.
6. Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan.
7. Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam.
8. Program peningkatan kualitas dan akses informasi SDA dan Lingkungan Hidup.

Pencapaian kedelapan program kerja diatas dapat dikategorikan baik dengan memperhatikan pencapaian kegiatan-kegiatan yang terkendala pada keterbatasan alokasi anggaran. Kegiatan yang terkendala pada pendanaan antara lain : 1) Dokumen pemantauan kualitas air, udara dan tanah untuk

menentukan IKLH 2) Penyusunan Laporan Periodik Perbulan Sampah Harian 3) Program ADIPURA, Menuju Indonesia Hijau, Kalpataru, Adiwiyata 4) Pengkajian Dampak Lingkungan 5)

Keterbatasan dana merupakan faktor yang paling mempengaruhi kegiatan-kegiatan tersebut diatas tidak mendapatkan penganggaran, dan hal ini baik secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi hasil capaian target kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya.

Untuk tahun 2020 program dan kegiatan yang dilaksanakan adalah :

1. Program pelayanan administrasi perkantoran.
2. Program peningkatan prasaranan dan sarana aparatur.
3. Program peningkatan disiplin aparatur.
4. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur.
5. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan.
6. Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan.
7. Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam.
8. Program peningkatan kualitas dan akses informasi SDA dan Lingkungan Hidup.

Pencapaian kedelapan program kerja diatas dapat dikategorikan baik dengan memperhatikan pencapaian kegiatan-kegiatan yang terkendala pada keterbatasan alokasi anggaran. Ada beberapa program dan kegiatan yang terkendala pada penganggaran akibat pandemic covid-19 antara lain dilakukan pergeseran untuk penanganan covid-19. Dan untuk anggaran, ada beberapa program dan kegiatan yang sudah tidak lagi dianggarkan antara lain : 1) Program Peningkatan Disiplin Aparatur; 2) Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur; 3) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan.

B. Analisis Kinerja Pelayanan PD

Analisis kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dapat diukur berdasarkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) sebagai berikut :

Tabel 1. Tabel Analisis Kinerja

No	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Keterangan
1	Persentase penanganan sampah	100 %	
2	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL, UKL/UPL	100 %	
3	Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk	0.208 %	
4	Pengelolaan limbah B3 (Penerbitan Ijin)	0	Tidak terdapat penerbitan ijin
5	Pengelolaan limbah B3 yang diawasi	100 %	
6	Penegakan hukum lingkungan	100 %	
7	Pengelolaan kualitas air (Penetapan kelas air)	100 %	
8	Pengendalian potensi sumber pencemaran air	100 %	
9	Sampling pemantauan kualitas air sungai dan/danau secara berkala pada periode musim hujan dan kemarau	100 %	

C. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

1. Pembentukan Dinas Lingkungan Hidup berdasarkan Perda Nomor : 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Minahasa. Penetapan Perda ini sekaligus menyatakan peranan dan fungsi yang harus diemban oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Minahasa. Kondisi ini akan sangat membantu dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang diemban dalam usaha mengefektifkan kinerja organisasi.
2. Kualitas akademik yang dimiliki cukup memadai dalam arti tingkat pendidikan pegawai yang dimiliki rata-rata cukup tinggi disamping pengalaman yang cukup banyak dan kompleks, dimana beberapa dari personil tersebut pernah mengikuti diklat perencanaan dan teknis fungsional di bidang lingkungan. Tingkat pendidikan dan pengalaman

yang dimiliki ini sangat besar pengaruhnya dalam usaha meningkatkan kompetensi dan profesionalitas kinerja organisasi sehingga tujuan organisasi dapat terwujud.

3. Ketersediaan sarana dan prasarana yang cukup memadai dalam menunjang kelancaran tugas yang diemban. Ketersediaan sarana dan prasarana menunjang kegiatan ini menjadi salah satu faktor pendorong peningkatan efektifitas organisasi.
4. Adanya kewenangan yang cukup luas dari Pemerintah Kabupaten Minahasa. Hal ini sebagai implementasi diberlakukannya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 yang memberikan keleluasaan pada Pemerintah Daerah untuk lebih berkreasi dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan. Kondisi tersebut secara otomatis berlaku pada Dinas Lingkungan Hidup untuk lebih leluasa dalam mensinkronkan dan merasionalkan perencanaan dari masing-masing instansi atau lembaga sehingga akan memperkecil terjadinya dissinkronisasi perencanaan dalam rangka mendorong digunakannya prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan. Artinya Dinas Lingkungan Hidup harus lebih jeli dalam memperhatikan aspirasi masyarakat yang terus berkembang sehingga perencanaan pembangunan yang dilaksanakan adalah pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan dan untuk kepentingan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya.
5. Adanya instansi teknis yang ditetapkan dengan Perda dan pada umumnya sudah memahami tugas-tugas pokoknya. Pembentukan instansi teknis ini sebagai jawaban Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tersebut yang mana instansi yang dibentuk sesuai kebutuhan daerah.
6. Berkembangnya jumlah LSM dan adanya kebijaksanaan dari masyarakat dalam menyikapi pembangunan yang dilaksanakan hal ini akan menjadi *control social* terhadap Dinas Lingkungan Hidup dalam pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup disamping kemudahan-kemudahan yang diberikan masyarakat sehingga Dinas Lingkungan

Hidup dapat mengetahui sejauh mana kinerja organisasi dilaksanakan.

7. Semakin pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi akan menjadi peluang dalam menentukan kompetensi dari aparat. Kemampuan personil dalam memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi akan sangat membantu pencapaian tujuan organisasi artinya perencanaan yang profesional/berkompetensi sangat ditentukan melalui kemampuan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.
8. Belum optimalnya kegiatan yang memanfaatkan potensi sumber daya alam yang tersedia.
9. Danau Tondano dan Daerah Aliran Sungai (DAS) Tondano.
10. Program Adipura, MIH, Kalpataru dan Adiwiyata
11. Program Pengendalian Pencemaran
12. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam.
13. Program pengelolaan persampahan.

Permasalahan

1. Pentingnya pengembangan dan dorongan penerapan kegiatan ramah lingkungan yang tercermin pada efisiensi penggunaan sumberdaya dan menurunnya limbah, penguatan pemantauan pencemaran termasuk fasilitasi dan dukungan perluasannya.
2. Masih terbatasnya pegawai dengan kualifikasi sebagai perencana dan juga terbatasnya tenaga analis di bidang lingkungan. Hal ini akan menjadi faktor yang melemahkan dalam pencapaian tujuan organisasi. di mana tenaga perencana dan tenaga analis menjadi indikator penentu keakuratan suatu hasil perencanaan sebelumnya. Dengan kata lain keberhasilan suatu kegiatan sangat ditentukan dari kemampuan membuat suatu rencana yang matang dan kemampuan menganalisa suatu permasalahan yang timbul atau mungkin timbul dalam mencapai suatu *output* tertentu.

3. Sebagian personil belum memiliki ketentuan teknis dengan pemahaman terhadap tugas pokok dan fungsi lembaga masih rendah. Keterampilan teknis ini sangat dipengaruhi oleh kemampuan dan kemauan seorang perencana di bidang lingkungan untuk meningkatkan kompetensinya. Kondisi yang ada ini tidak lepas dari latar belakang pendidikan teknis yang dimiliki oleh seseorang di samping disiplin ilmu dan pemahaman terhadap tugas yang berbeda-beda. Perbedaan ini akan menyebabkan sulit dimunculkannya upaya untuk berkreasi. Kecenderungan lain yang merupakan salah satu faktor pendukung sistem yang ada tersebut.
4. Kurangnya dana operasional di bidang lingkungan hidup, yang dapat menunjang pencapaian sasaran kinerja organisasi.
5. Kemampuan masyarakat untuk mengkristalkan kebutuhannya dan mengartikulasikan kerjasamanya masih rendah. Hal ini menjadi tantangan karena pemerintah akan sulit mengungkap apa yang menjadi kebutuhan terasa (*feel need*) dan kebutuhan nyata (*real need*) atau kebutuhan masa depan dari masyarakat.
6. Kondisi sosial budaya masyarakat yang heterogen, kondisi perekonomian yang belum mantap dan kondisi politik yang terus berkembang.
7. Pendangkalan Danau Tondano akibat pertumbuhan ecang gondok, kegiatan pertanian, dan aktifitas masyarakat.
8. Kurangnya pemahaman dari instansi pemerintah, swasta, organisasi kemasyarakatan, dan masyarakat tentang konsep MIH, Kalpataru, Adiwiyata dan Adipura sehingga kurang terlibat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup termasuk kebersihan kota dan lingkungan sekolah.
9. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang pengelolaan sampah.

Kebijakan yang diambil dengan memperhatikan tujuan, sasaran dan lingkungan strategis Dinas Lingkungan Hidup adalah:

1. Sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan lingkungan hidup melalui keterlibatan *stake holder* lingkungan lainnya.
2. Meningkatkan efisiensi pelaksanaan kegiatan pembangunan lingkungan hidup melalui peningkatan pengendalian, monitoring dan evaluasi pembangunan lingkungan hidup.
3. Menyediakan informasi yang akurat dan *up to date* melalui peningkatan efektifitas sistem informasi dan pelaporan.
4. Mengoptimalkan fungsi DAS Tondano melalui rehabilitasi dan tindakan konservasi lainnya.
5. Mengoptimalkan fungsi lingkungan hidup kawasan pariwisata dan ekosistem lainnya melalui rehabilitasi dan tindakan konservasi lainnya.
6. Mengoptimalkan kegiatan konservasi yang partisipatif.
7. Meningkatkan kompetensi aparat, kinerja dan akuntabilitas organisasi.
8. Membangun komitmen belajar dan menjadikan Dinas Lingkungan Hidup sebagai organisasi pembelajaran.
9. Mengoptimalkan pengelolaan persampahan.

Arah kebijakan Dinas Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan koordinasi dan efektifitas mekanisme penyusunan program pengelolaan lingkungan hidup.
2. Peningkatan pengendalian, monitoring dan evaluasi pembangunan lingkungan hidup daerah.
3. Pencegahan kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup.
4. Pengembangan dan peningkatan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup.
5. Pengkajian potensi SDA dan lingkungan hidup serta rencana pengelolaannya.
6. Konservasi dan rehabilitasi DAS/Danau Tondano
7. Konservasi dan rehabilitasi kawasan pariwisata.
8. Peningkatan kompetensi aparat Dinas Lingkungan Hidup.

9. Peningkatan jenjang pendidikan formal.
10. Peningkatan SDM tentang Pengelolaan persampahan.

D. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Dengan memperhatikan berbagai faktor serta dengan analisis terhadap efisiensi serta efektifitas program dan kegiatan, hasil analisis kebutuhan program dan kegiatan (terlampir)

E. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dengan memperhatikan usulan dari setiap stakeholder, dan masyarakat disertai analisis dari data-data yang ada, berikut ini hasil rangkuman usulan program dan kegiatan masyarakat:

1. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

Tabel 8. Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Tahun 2021

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator
1.	Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	<ul style="list-style-type: none"> - Pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup - Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan sumber pencemar - Pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup 	<p>Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pencegahan pencemaran lingkungan hidup dilaksanakan terhadap media tanah, air, udara dan laut</p> <p>Penghentian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup</p> <p>Koordinasi dan sinkronisasi penghentian sumber pencemar</p>	<p>Terukurnya kualitas air, udara dan tanah/ tutupan lahan</p> <p>Pengendalian gulma air (eceng gondok) di <i>Danau Tondano</i></p> <p>Terlaksananya Koordinasi dan sinkronisasi penghentian sumber pencemar</p>

Hasil analisis menunjukkan kegiatan pencegahan, penanggulanagn dan pemulihan lingkungan merupakan kegiatan favorit dimana tingkat

kepedulian serta partisipasi masyarakat pada kegiatan khususnya untuk penanggulangan gulma air eceng gondok sangat tinggi. Hal ini ditunjang pula karena pada tahun-tahun sebelumnya kegiatan ini dilakukan dengan melibatkan masyarakat seputaran danau tondano sehingga semangat untuk menjadikan danau tondano sebagai salah satu destinasi pariwisata favorit masyarakat baik lokal maupun nasional bahkan internasional.

Kegiatan pengukuran kualitas air, udaran dan tanah/tutupan lahan juga sangat penting untuk mengetahui apakah sudah tercemar atau tidak dengan melakukan pengambilan sampel untuk di uji di laboratorium serta pemantauan secara langsung di lapangan.

Kegiatan koordinasi dan sinkronisasi untuk pengehentian sumber pencemaaar sangat penting untuk mengsinkronkan kegiatan dengan Perangkat Daerah lainnya bahkan sampai ke Tingkat Provinsi dan Nasional.

2. Program Pengelolaan Persampahan

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator
1.	Program Pengelolaan Persampahan	- Pengelolaan Persampahan	<ul style="list-style-type: none"> - Pengurangan sampah dengan melakukan pembatasan, daur ulang dan pemanfaatan kembali - Penanganan sampah dengan melakukan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST/ SPA Kabupaten/Kota - Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan 	<ul style="list-style-type: none"> - Terbangunnya Bank Sampah beserta Fasilitasnya - Tertanganinya timbulan sampah 100% - Tersedianya sarpras untuk menunjang pengelolaan sampah - Koordinasi dan sinkronisasi pengelolaan sampah di Provinsi

Hasil analisis menunjukkan program Program Pengelolaan Persampahan merupakan kegiatan favorit dimana tingkat kepedulian serta partisipasi masyarakat pada kegiatan ini sangat tinggi. Hal ini ditunjang pula karena pada tahun-tahun sebelumnya Kota Tondano pernah meraih penghargaan Piala ADIPURA sehingga semangat untuk mempertahankan melakukan kebersihan lingkungan tersebut mendorong partisipasi masyarakat beserta segenap elemen terkait untuk bekerja lebih giat.

3. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3)

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator
1.	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3)	Verifikasi lapangan untuk memastikan pemenuhan persyaratan administrasi dan teknis penyimpanan sementara limbah B3	Verifikasi lapangan kaitan dengan administrasi teknis penyimpanan sementara LB3	Terpenuhinya administrasi teknis penyimpanan sementara LB3

Hasil analisa menunjukan bahwa setiap usaha dan atau kegiatan yang menghasilkan Limbah bahan Berbahaya dan Beracun (LB3) harus memenuhi administrasi teknis penyimpanan sementara sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Setiap usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan LB3 wajib memiliki ijin.

4. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator
1.	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	embinaan dan pengawasan terhadap usaha dan /atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten	Pengawasan usaha dan /atau kegiatan yang izin lingkungan hidup, izin PPLH yang diterbitkan oleh pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan

Hasil analisa menunjukan bahwa usaha dan/atau kegiatan yang sudah diterbitkan izin lingkungan harus melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup

sesuai dengan apa yang tercantum dalam dokumen lingkungan dan izin lingkungan.

Masih ada usaha dan/atau kegiatan yang sudah diterbitkan izin lingkungan namun belum memiliki kesadaran untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sehingga berpotensi terjadi pencemaran lingkungan hidup, bahkan ada usaha dan/atau kegiatan yang sudah melakukan kegiatan bahkan sudah beroperasi namun tidak didukung dengan administrasi baik dokumen lingkungan bahkan izin lingkungan.

5. PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator
1.	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap PPLH Kabupaten	Penanganan laporan pengaduan masyarakat terhadap PPLH	Terlaksananya penanganan laporan pengaduan terhadap PPLH

Hasil analisa menunjukkan bahwa masih ada usaha dan/atau kegiatan yang tidak melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup sehingga berpotensi terjadi pencemaran lingkungan yang berdampak pada aktifitas masyarakat sekitar. Khususnya lokasi usaha dan/atau kegiatan yang jarak dengan pemukiman tidak sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga usaha dan/atau kegiatan sering dilaporkan oleh masyarakat karena sudah mengganggu pemukiman yang berdekatan dengan lokasi kegiatan.

BAB. III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

A. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan Pembangunan Nasional merupakan cara untuk pencapaian tujuan Nasional dengan mengedepankan prioritas pembangunan. Prioritas pembangunan nasional saat ini; 1) Reformasi birokrasi dan tata kelola, 2) Pendidikan, 3) Kesehatan, 4) Penanggulangan Kemiskinan, 5) Ketahanan pangan, 6) Infrastruktur, 7) Iklim Investasi dan Iklim usaha, 8) Energi, 9) Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana, 10) Daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pascakonflik 11) Kebudayaan, kreatifitas dan inovasi teknologi 12) Prioritas lainnya dibidang politik, hukum dan keamanan, 13) Prioritas Lainnya dibidang Perekonomian, 14) Prioritas lainnya dibidang kesejahteraan rakyat.

Visi pelestarian lingkungan hidup bertolak dari pembukaan UUD 1945 yaitu; terlindungnya segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, terciptanya kesejahteraan umum dan kehidupan bangsa yang cerdas, dan dapat berperannya bangsa Indonesia dalam melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Menilik pada pernyataan diatas, maka Dinas Lingkungan Hidup Kab Minahasa merumuskan Visi lembaganya sebagai berikut:

“Terwujudnya Lingkungan Hidup Yang Lestari Melalui Pendekatan Pengelolaan Partisipatif Yang Serasi, Selaras, Seimbang dan Berwawasan Lingkungan”

Untuk mewujudkan Visi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Minahasa tersebut maka telah ditetapkan Misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan Sinergitas Program Pembangunan Lingkungan Hidup Daerah;
2. Meningkatkan Kualitas Pengendalian Pembangunan Lingkungan Hidup Daerah;
3. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ekosistemnya ; dan

4. Membangun Komitmen Belajar dalam rangka Peningkatan Kompetensi, Kualitas dan Akuntabilitas Aparat Dinas Lingkungan Hidup.

B. Tujuan dan Sasaran RENJA OPD

Merujuk pada Perencanaan Strategik (RENSTRA) 2018 - 2023 Dinas Lingkungan Hidup Menetapkan Tujuan dan Sasaran sebagai berikut;

1. Tujuan

- a. Meningkatkan Pelsetarian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.
- b. Meningkatkan kualitas birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik dalam mendukung peningkatan daya saing dan kinerja

2. Sasaran

- a. Menurunnya beban pencemaran Udara, Air dan Tutupan Lahan/tanah.
- b. Peningkatan pengelolaan sampah di wilayah Kabupaten/Kota
- c. Peningkatan akuntanilitas kinerja dan kepuasan stakeholder terhadap pelayanan perangkat daerah.

C. Program dan Kegiatan

Bertolak dari Rencana Strategik Kabupaten Minahasa Tahun 2018 – 2023 dan menilik pada Tugas, Fungsi, dan Kebutuhan Satuan Kerja Perangkat Daerah disertai kajian dan masukan dari berbagai pihak, maka ditetapkan Rencana Kerja PD Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021. Program-program yang direncanakan selama tahun 2021 adalah :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah daerah.
2. Program Perencanaan Lingkungan Hidup.
3. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup.
4. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dab Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3).

5. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH).
6. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat.
7. Program penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat.
8. Program penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup.
9. Program Pengelolaan Persampahan.

Rincian Kegiatan pada setiap program dalam Lampiran ini

Jumlah total pagu indikatif Rumusan rencana program dan kegiatan yang tersebut diatas adalah **Rp. 17.485.402.613** (Tuju belas milyar empat ratus delapan puluh lima juta empat ratus dua ribu enam ratus tiga belas rupiah).

Dalam rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan diatas mengemukakan tentang rencana strategis yang berdasarkan analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pengusulan program, kegiatan dan sub kegiatan dimaksud. Sedangkan untuk indikator kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan disusun berdasarkan kebutuhan untuk mencapai sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan.

Namun demikian apabila indikator kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan pada saat pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan mengalami, maka akan disesuaikan sebagaimana mestinya menurut petunjuk teknis, aturan, serta perundang-undangan yang berlaku.

BAB. IV

PENUTUP

Terlaksananya suatu sistem pembangunan nasional yang sukses tidak lepas dari sistem perencanaan yang baik. Hal ini pula yang melatar belakangi penyusunan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Minahasa. Tentunya penyusunan RENJA ini mengacu serta memperhatikan Tugas, Fungsi dan Kebutuhan Unit Kerja selama tahun berjalan serta dengan memperhatikan evaluasi kinerja tahun-tahun sebelumnya.

Secara umum program-program yang direncanakan selama Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah..
2. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup.
3. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3).
4. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH).
5. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat.
6. Program penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat.
7. Program penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup.
8. Program Pengelolaan Persampahan.

Jumlah total pagu indikatif Rencana Kerja PD Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Minahasa untuk Tahun Anggaran 2021 adalah : **Rp. Rp. 17.485.402.613** (Tuju belas milyar empat ratus delapan puluh lima juta empat ratus dua ribu enam ratus tiga belas rupiah).

LAMPIRAN

REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2021

KUNGAN HIDUP

No	Rancangan Awal RKPD (Tahun 2021)					Hasil Analisis Kebutuhan (Tahun 2022)					Catatan Penting
	Program/kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Minahasa		Persentasi dokumen perencanaan yang disusun		Rp 4,252,259,010	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Tersusunnya Dokumen Perencanaan	7 dok	Rp 7,538,099,999	
	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Terlaksananya perencanaan serta evaluasi kinerja perangkat daerah	1 laporan	Rp 2,000,000	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Terlaksananya perencanaan serta evaluasi kinerja PD	7 dok	Rp 7,000,000	
	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan PD yang disusun			Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan PD yang disusun	1 dok	Rp 1,000,000	
	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA yang disusun			Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA yang disusun	1 dok	Rp 1,000,000	
	Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan RKA			Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan RKA	1 dok	Rp 1,000,000	
	Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen DPA yang disusun			Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen DPA yang disusun	1 dok	Rp 1,000,000	
	Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan DPA yang disusun			Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan DPA yang disusun	1 dok	Rp 1,000,000	
	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan iktislar realisasi kinerja SKPD		Jumlah laporan capaian kinerja dan iktislar realisasi kinerja PD			Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan iktislar realisasi kinerja SKPD		Jumlah laporan capaian kinerja dan iktislar realisasi kinerja PD	1 dok	Rp 1,000,000	
	Evaluasi kinerja perangkat daerah		Jumlah laporan evaluasi PD	1 laporan	Rp 2,000,000	Evaluasi kinerja perangkat daerah		Jumlah laporan evaluasi PD	1 dok	Rp 1,000,000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentasi pengelolaan keuangan daerah		Rp 2,746,559,010	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentasi pengelolaan keuangan daerah	100%	Rp 2,805,000,000	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah bulan penyediaan gaji dan tunjangan ASN DLH	14 bulan	Rp 2,741,559,010	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah bulan penyediaan gaji dan tunjangan ASN DLH	14 Bln	Rp 2,800,000,000	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					
	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD					Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD					
	Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD					Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD					
	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun		Jumlah laporan/berita acara hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun	1 laporan	Rp 1,000,000	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun		Jumlah laporan/berita acara hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun	1 lap	Rp 1,000,000	
	Pengelolaan dan penyiapan tanggapan bahan pemeriksaan		Jumlah rancangan laporan tanggapan pemeriksaan	1 dok	Rp 1,000,000	Pengelolaan dan penyiapan tanggapan bahan pemeriksaan		Jumlah rancangan laporan tanggapan pemeriksaan	1 dok	Rp 1,000,000	
	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/ semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/triwulan/ Semesteran	17 laporan	Rp 2,000,000	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/ semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/triwulan/ Semesteran	17 lap	Rp 2,000,000	
	Penyusunan laporan dan analisis prognosis realisasi anggaran		Jumlah rancangan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran yang disusun	1 laporan	Rp 1,000,000	Penyusunan laporan dan analisis prognosis realisasi anggaran		Jumlah rancangan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran yang disusun	2 lap	Rp 1,000,000	
	Administrasi Barang Milik Daerah		Persentasi penyediaan barang milik daerah			Administrasi Barang Milik Daerah		Persentasi penyediaan barang milik daerah	100%	Rp 1,000,000	
	Penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD					Penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD					
	Pengamanan barang milik daerah SKPD					Pengamanan barang milik daerah SKPD					
	Koordinasi dan penilaian barang milik daerah					Koordinasi dan penilaian barang milik daerah					
	Pembinaan, pengawasan dan pengendalian barang milik daerah pada SKPD					Pembinaan, pengawasan dan pengendalian barang milik daerah pada SKPD					
	Rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD					Rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD		Jumlah laporan rekonsiliasi barang milik daerah	1 lap	Rp 1,000,000	

No	Rancangan Awal RKPD (Tahun 2021)					Hasil Analisis Kebutuhan (Tahun 2022)					Catatan Penting
	Program/kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD					Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD					
	Pemanfaatan barang milik daerah					Pemanfaatan barang milik daerah					
	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah					Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah				Rp	-
	Perencanaan pengelolaan retribusi daerah					Perencanaan pengelolaan retribusi daerah					
	Analisa dan pengembangan retribusi daerah serta penyusunan kebijakan retribusi daerah					Analisa dan pengembangan retribusi daerah serta penyusunan kebijakan retribusi daerah					
	Penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan retribusi daerah					Penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan retribusi daerah					
	Pendataan dan pendaftaran objek retribusi daerah					Pendataan dan pendaftaran objek retribusi daerah					
	Pengelolaan data retribusi daerah					Pengelolaan data retribusi daerah					
	Penetapan wajib retribusi daerah					Penetapan wajib retribusi daerah					
	Pelaporan pengelolaan retribusi daerah					Pelaporan pengelolaan retribusi daerah					
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase disiplin ASN DLH meningkat		Rp 45,000,000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase disiplin ASN DLH meningkat	100%	Rp 267,000,000	
	Penigkatan sarana dan prsarana disiplin pegawai					Penigkatan sarana dan prsarana disiplin pegawai					
	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut perlengkapannya		Jumlah pakaian dinas beserta atribut perlengkapannya yang diadakan (pakaian olah raga dan PDH)	25 stel	Rp 25,000,000	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut perlengkapannya		Jumlah pakaian dinas beserta atribut perlengkapannya yang diadakan (pakaian olah raga dan PDH)	27 stel	Rp 26,000,000	
	Pendataan dan pengelolaan administrasi kepegawaian					Pendataan dan pengelolaan administrasi kepegawaian					
	Koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian					Koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian					
	Monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja					Monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja					
	Pemulangan pegawai yang pensiun					Pemulangan pegawai yang pensiun					
	Pemulangan pegawai yang meninggal berdasarkan tugas dan fungsi					Pemulangan pegawai yang meninggal berdasarkan tugas dan fungsi					
	Pemindahan tugas ASN					Pemindahan tugas ASN					
	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi		Jumlah ASN DLH yang mengikuti Diklat	3 ASN	Rp 20,000,000	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi		Jumlah pegawai yang mengikuti diklat sesuai tugas dan fungsi	3 ASN	Rp 21,000,000	
	Sosialisasi Peraturan perundang-undangan					Sosialisasi Peraturan perundang-undangan		Jumlah kegiatan sosialisasi	4 kali	Rp 200,000,000	
	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan					Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan		Jumlah Bimtek implementasi peraturan perundang-undangan	4 kali	Rp 20,000,000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase penyediaan dan pengelolaan administrasi umum PD		Rp 191,600,000	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase penyediaan dan pengelolaan administrasi umum PD	100%	Rp 357,500,000	
	Penyediaan Komponen alat listrik/penerangan bangunan kantor		Jumlah komponen alat listrik/penerangan			Penyediaan Komponen alat listrik/penerangan bangunan kantor		Jumlah komponen alat listrik/penerangan	1 paket	Rp 10,000,000	
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor		Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor (ATK)	1 paket	Rp 30,000,000	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor		Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor (ATK)	1 paket	Rp 100,000,000	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Peralatan rumah tangga yang disediakan	1 paket	Rp 20,000,000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					Penyediaan Bahan Logistik Kantor					
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan		Jumlah barang cetakan dan penggandaan	1 paket	Rp 35,000,000	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan		Jumlah barang cetakan dan penggandaan	1 paket	Rp 40,000,000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan					
	Penyediaan bahan/material					Penyediaan bahan/material					
	Fasilitas kunjungan tamu		Jumlah tamu yang terfasilitasi	54 orang	Rp 6,600,000	Fasilitas kunjungan tamu		Jumlah tamu yang terfasilitasi	60 orang	Rp 7,500,000	
	Penyeleenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi		Jumlah laporan rapat koordinasi dan konsultasi	10 lap	Rp 100,000,000	Penyeleenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi		Jumlah laporan rapat koordinasi dan konsultasi	20 lap	Rp 200,000,000	
	Penatausahaan arsip dinas pad SKPD					Penatausahaan arsip dinas pad SKPD					
	Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD					Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD					

No	Rancangan Awal RKPD (Tahun 2021)					Hasil Analisis Kebutuhan (Tahun 2022)					Catatan Penting
	Program/kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintah Daerah		Persentasi pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah		Rp 105,000,000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintah Daerah		Persentasi pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100%	Rp 3,660,000,000	
	Pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan					Pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan		Jumlah kendaraan dinas jabatan (Mobnas Kadis)	1 unit	Rp 550,000,000	
	Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan					Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan		Jumlah kendaraan dinas operasional (truck sampah)	2 unit	Rp 1,100,000,000	
	Pengadaan alat besar					Pengadaan alat besar		Jumlah alat besar (Excavator TPA)	1 unit	Rp 1,750,000,000	
	Pengadaan alat angkutan darat tak bermotor					Pengadaan alat angkutan darat tak bermotor		Jumlah alat angkutan darat tak bermotor (Container) sampah	5 unit	Rp 200,000,000	
	Pengadaan mebel					Pengadaan mebel					
	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya		Jumlah peralatan dan mesin (Pengadaan Laptop, PC, Printer, Scanner dan TV)	13 unit	Rp 105,000,000	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya		Jumlah peralatan dan mesin (PC, Projector/LCD)	5 unit	Rp 60,000,000	
	Pengadaan aset tetap lainnya					Pengadaan aset tetap lainnya					
	Pengadaan aset tak berwujud					Pengadaan aset tak berwujud					
	Pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya					Pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya					
	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya					Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya					
	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya					Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya					
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah		Rp 236,600,000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	12 bln	Rp 236,600,000	
	Penyediaan jasa surat menyurat					Penyediaan jasa surat menyurat					
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		Jumlah bulan jasakomunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	Rp 35,000,000	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		Jumlah bulan jasakomunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	Rp 35,000,000	
	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor					Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor					
	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor		Jumlah bulan jasa pelayanan umum kantor (THL)	12 bulan	Rp 201,600,000	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor		Jumlah bulan jasa pelayanan umum kantor (THL)	12 bulan	Rp 201,600,000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Rp 202,500,000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	27 unit	Rp 203,999,999	
	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan		Jumlah kendaraan dinas jabatan	1 unit	Rp 38,500,000	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan		Jumlah kendaraan dinas jabatan	1 unit	Rp 39,999,999	
	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan perorangan dinas operasional dan lapangan		Jumlah kendaraan dinas dan operasional yang dilakukan pembayaran pajak	1 unit	Rp 34,000,000	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan perorangan dinas operasional dan lapangan		Jumlah kendaraan dinas dan operasional yang dilakukan pembayaran pajak	1 unit	Rp 34,000,000	
	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan perizinan alat besar					Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan perizinan alat besar					
	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan perizinan alat angkutan darat tak bermotor					Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan perizinan alat angkutan darat tak bermotor					
	Pemeliharaan mebel					Pemeliharaan mebel					
	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya		jumlah peralatan dan mesin yang terpelihara		Rp 30,000,000	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya		jumlah peralatan dan mesin yang terpelihara	24 unit	Rp 30,000,000	
	Pemeliharaan aset tetap lainnya					Pemeliharaan aset tetap lainnya					
	Pemeliharaan aset tak berwujud					Pemeliharaan aset tak berwujud					
	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya		Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara dan direhabilitasi		Rp 100,000,000	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya		Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara dan direhabilitasi	1 unit	Rp 100,000,000	
	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya					Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya					
	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya					Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya					
	Pemeliharaan/rehabilitasi tanah					Pemeliharaan/rehabilitasi tanah					

No	Rancangan Awal RKPD (Tahun 2021)					Hasil Analisis Kebutuhan (Tahun 2022)					Catatan Penting
	Program/kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar					Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar					
	Urusan Pemerintahan di Bidang Lingkungan Hidup					Urusan Pemerintahan di Bidang Lingkungan Hidup				Rp 15,212,528,796	
2	Program Perencanaan Lingkungan Hidup				Rp 725,000,000	Program Perencanaan Lingkungan Hidup				Rp -	
	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)					Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)				Rp -	
	Penyusunan dan Penetapan RPPLH					Penyusunan dan Penetapan RPPLH					
	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH					Pengendalian Pelaksanaan RPPLH					
	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)				Rp 725,000,000	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)				Rp -	
	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Umum Tata Ruang					Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Umum Tata Ruang					
	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPIMD	Jumlah dokume KLHS RPJPD		1 dok	Rp 75,000,000	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPIMD					
	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Untuk KRP Yang Berpotensi menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup	Jumlah dokumen KLHS Rencana Penanaman Modal, Riparkab dan Review Dokumen Zonasi DanauTondano		3 dok	Rp 650,000,000	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Untuk KRP Yang Berpotensi menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup					
3	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup		Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)		Rp 6,508,693,900	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup		Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	60.11	Rp 6,738,693,900	
	Pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup		Terukurnya kualitas air, udara dan tanah/ tutupan lahan		Rp 60,000,000	Pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup		Terukurnya kualitas air, udara dan tanah/ tutupan lahan	3 komp	Rp 290,000,000	
	Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pencegahan pencemaran lingkungan hidup dilaksanakan terhadap media tanah, air, udara dan laut		Pengukuran kualitas air, udara, tanah/ tutupan lahan dan Rehabilitasi terumbu karang serta rehabilitasi hutan mangrove		9 lokasi	Rp 60,000,000	Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pencegahan pencemaran lingkungan hidup dilaksanakan terhadap media tanah, air, udara dan laut		11 lokasi	Rp 290,000,000	
	Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pengendalian emisi gas rumah kaca, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim					Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pengendalian emisi gas rumah kaca, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim					
	Pengelolaan laboratorium lingkungan hidup Kabupaten/Kota					Pengelolaan laboratorium lingkungan hidup Kabupaten/Kota					
	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan sumber pencemar		Jumlah sumber pencemar yang tertangani		Rp 6,428,693,900	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan sumber pencemar		Jumlah sumber pencemar yang tertangani	1 danau	Rp 6,448,693,900	
	Pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup pada masyarakat					Pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup pada masyarakat					
	Pengisolasian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup					Pengisolasian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup					
	Penghentian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Pengendalian gulma air (eceng gondok) di Danau Tondano		1 lokasi	Rp 6,428,693,900	Penghentian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup		Pengendalian gulma air (eceng gondok) di Danau Tondano	1 lokasi	Rp 6,428,693,900	
		Pengangkatan Eceng Gondok Padat Karya Tunai Di Danau Tondano Tahun (jasa tenaga kebersihan)		37.227 orang	4,094,970,000			Pengangkatan Eceng Gondok Padat Karya Tunai Di Danau Tondano Tahun (jasa tenaga kebersihan)	37.227 orang	4,094,970,000	
		Bayar Jasa Operator Alat Berat 4 Unit Excavator Tahun		12 bln	336,000,000			Bayar Jasa Operator Alat Berat 4 Unit Excavator Tahun	12 bln	336,000,000	
		Bayar Jasa Petugas Kebersihan Pesisir Danau Tondano		12 bln	450,000,000			Bayar Jasa Petugas Kebersihan Pesisir Danau Tondano	12 bln	450,000,000	
		Pemeliharaan alat besar excavator		1 tahun	800,868,000			Pemeliharaan alat besar excavator	1 tahun	800,868,000	
		Pemeliharaan alat besar tangkang			47,100,000			Pemeliharaan alat besar tangkang		47,100,000	
		Sewa Mobilitas Angkutan (Dump Truck) Eceng Gondok di Danau Tondano Tahun		1 tahun	500,000,000			Sewa Mobilitas Angkutan (Dump Truck) Eceng Gondok di Danau Tondano Tahun	1 tahun	500,000,000	
		Sosialisasi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup		5 bln	199,755,900			Sosialisasi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	5 bln	199,755,900	
	Pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup		Terlaksananya pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup		Rp 20,000,000	Pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup		Terlaksananya pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	20 kegiatan	Rp 20,000,000	

No	Rancangan Awal RKPD (Tahun 2021)					Hasil Analisis Kebutuhan (Tahun 2022)					Catatan Penting
	Program/kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Koordinasi dan sinkronisasi penghentian sumber pencemar		Jumlah Koordinasi dan sinkronisasi penghentian sumber pencemar (perjalanan dinas DD)	20 lap	Rp 20,000,000	Koordinasi dan sinkronisasi penghentian sumber pencemar		Jumlah Koordinasi dan sinkronisasi penghentian sumber pencemar (perjalanan dinas DD)	20 laporan	Rp 20,000,000	
	Koordinasi dan sinkronisasi pembersihan unsur pencemar					Koordinasi dan sinkronisasi pembersihan unsur pencemar					
	Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan remediasi					Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan remediasi					
	Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan rehabilitasi					Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan rehabilitasi					
	Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan restorasi					Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan restorasi					
4	Program Pengelolaan Keekaragaman Hayati					Program Pengelolaan Keekaragaman Hayati				Rp -	
	<i>Pengelolaan keekaragaman hayati</i>					<i>Pengelolaan keekaragaman hayati</i>				Rp -	
	Penyusunan dan penetapan rencana pengelolaan keekaragaman hayati					Penyusunan dan penetapan rencana pengelolaan keekaragaman hayati					
	Pengelolaan taman keekaragaman hayati di luar kawasan hutan					Pengelolaan taman keekaragaman hayati di luar kawasan hutan					
	Pengelolaan kebun raya					Pengelolaan kebun raya					
	Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)					Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)					
	Pengelolaan taman keekaragaman hayati lainnya					Pengelolaan taman keekaragaman hayati lainnya					
	Pengembangan kapasitas kelembagaan dan SDM dalam pengelolaan keekaragaman hayati					Pengembangan kapasitas kelembagaan dan SDM dalam pengelolaan keekaragaman hayati					
	Pengelolaan saran dan prasarana keekaragaman hayati					Pengelolaan saran dan prasarana keekaragaman hayati					
5	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3)		Terlaksananya penerbitan izin B3 dn LB3		Rp 10,000,000	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3)		Terlaksananya penerbitan izin B3 dn LB3	20 keg	Rp 15,000,000	
	<i>Penyimpanan sementara limbah B3</i>		<i>Jumlah Kegiatan yang memiliki ijin B3</i>		<i>Rp 10,000,000</i>	<i>Penyimpanan sementara limbah B3</i>		<i>Jumlah Kegiatan yang memiliki ijin B3</i>	<i>20 keg</i>	<i>Rp 15,000,000</i>	
	Fasilitasi pemenuhan komitmen izin penyimpanan sementara limbah B3 dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik					Fasilitasi pemenuhan komitmen izin penyimpanan sementara limbah B3 dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik					
	Verifikasi lapangan untuk memastikan pemenuhan persyaratan administrasi dan teknis penyimpanan sementara limbah B3		Jumlah laporan verifikasi lapangan (Perjalanan dinas DD)	13 lap	Rp 10,000,000	Verifikasi lapangan untuk memastikan pemenuhan persyaratan administrasi dan teknis penyimpanan sementara limbah B3		Jumlah laporan verifikasi lapangan (Perjalanan dinas DD)	20 lap	Rp 15,000,000	
	<i>Pengumpulan limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>					<i>Pengumpulan limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>				Rp -	
	Fasilitasi pemenuhan komitmen izin pengumpulan limbah B3 dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik					Fasilitasi pemenuhan komitmen izin pengumpulan limbah B3 dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik					
	Koordinasi dan sinkronisasi pengelolaan limbah B3 dengan pemerintah provinsi dalam rangka pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan / atau penimbunan					Koordinasi dan sinkronisasi pengelolaan limbah B3 dengan pemerintah provinsi dalam rangka pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan / atau penimbunan					
6	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)		Terlaksananya pembinaan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin PPLH		Rp 40,000,000	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)		Terlaksananya pembinaan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin PPLH	54 keg	Rp 40,000,000	
	<i>Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan /atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</i>		<i>Jumlah usaha dan kegiatan yang dilakukan pembinaan dan pengawasan</i>		<i>Rp 40,000,000</i>	<i>Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan /atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</i>		<i>Jumlah usaha dan kegiatan yang dilakukan pembinaan dan pengawasan</i>	<i>54 usaha</i>	<i>Rp 40,000,000</i>	

No	Rancangan Awal RKPD (Tahun 2021)					Hasil Analisis Kebutuhan (Tahun 2022)					Catatan Penting
	Program/kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Facilitasi pemenuhan ketentuan dan kewajiban izin lingkungan dan /atau izin PPLH					Facilitasi pemenuhan ketentuan dan kewajiban izin lingkungan dan /atau izin PPLH					
	Pengembangan kapasitas pejabat pengawas lingkungan hidup					Pengembangan kapasitas pejabat pengawas lingkungan hidup					
	Pengawasan usaha dan /atau kegiatan yang izin lingkungan hidup, izin PPLH yang diterbitkan oleh pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah laporan pengawasan yang dilaksanakan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan (Perjalanan dinas DD)	54 lap	Rp 40,000,000	Pengawasan usaha dan /atau kegiatan yang izin lingkungan hidup, izin PPLH yang diterbitkan oleh pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah laporan pengawasan yang dilaksanakan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan (Perjalanan dinas DD)	54 laporan	Rp 40,000,000	
	Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan dan penerapan sanksi upaya dan rencana PPLH					Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan dan penerapan sanksi upaya dan rencana PPLH					
7	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH					PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH				Rp -	
	<i>Pengakuan MHA, kearifan lokal, pengetahuan tradisional dan hak MHA yang terkait dengan PPLH</i>					<i>Pengakuan MHA, kearifan lokal, pengetahuan tradisional dan hak MHA yang terkait dengan PPLH</i>				Rp -	
	Koordinasi, sinkronisasi, penyediaan data dan informasi pengakuan keberadaan MHA kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH					Koordinasi, sinkronisasi, penyediaan data dan informasi pengakuan keberadaan MHA kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH					
	<i>Peningkatan kapasitas MHA dan kearifan lokal, pengetahuan tradisional dan hak MHA yang terkait dengan PPLH</i>					<i>Peningkatan kapasitas MHA dan kearifan lokal, pengetahuan tradisional dan hak MHA yang terkait dengan PPLH</i>				Rp -	
	Pemberdayaan, kemitraan, pendampingan dan penguatan kelembagaan MHA, kearifan lokal, pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH					Pemberdayaan, kemitraan, pendampingan dan penguatan kelembagaan MHA, kearifan lokal, pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH					
8	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT		Telaksananya Diklat dan Penyuluhan Lingkungan Hidup		Rp 10,000,000	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT		Telaksananya Diklat dan Penyuluhan Lingkungan Hidup	4 klmpk	Rp 20,000,000	
	<i>Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat daerah Kabupaten/ Kota</i>		<i>Jumlah Diklat dan Sosialisasi serta pendampingan bagi kelompok masyarakat</i>		<i>Rp 10,000,000</i>	<i>Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat daerah Kabupaten/ Kota</i>		<i>Jumlah Diklat dan Sosialisasi serta pendampingan bagi kelompok masyarakat</i>	<i>4 klmpk</i>	<i>Rp 20,000,000</i>	
	Peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia bidang lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan					Peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia bidang lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan					
	Pendampingan gerakan peduli lingkungan hidup		Jumlah Kelompok masyarakat (Klmpk Bank Sampah)	4 klmpk	Rp 10,000,000	Pendampingan gerakan peduli lingkungan hidup		Jumlah Kelompok masyarakat (Klmpk Bank Sampah)	4 klmpk	Rp 20,000,000	
	Penyelenggaraan penyuluhan dan kampanye lingkungan hidup					Penyelenggaraan penyuluhan dan kampanye lingkungan hidup					
9	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT		Tercapainya penghargaan lingkungan hidup		Rp 50,000,000	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT		Tercapainya penghargaan lingkungan hidup	1 keg	Rp 200,000,000	
	<i>Pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat daerah Kabupaten/Kota</i>		<i>Jumlah Kegiatan</i>		<i>Rp 50,000,000</i>	<i>Pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat daerah Kabupaten/Kota</i>		<i>Jumlah Kegiatan</i>	<i>1 keg</i>	<i>Rp 200,000,000</i>	
	Penilaian kinerja masyarakat/ Lembaga masyarakat/ Dunia usaha/ Dunia pendidikan/ Filantropi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup		Jumlah laporan kegiatan penghargaan hari lingkungan hidup sedunia (ikut serta dalam kegiatan hari lingkungan hidup sedunia di Jakarta)	1 lap	Rp 50,000,000	Penilaian kinerja masyarakat/ Lembaga masyarakat/ Dunia usaha/ Dunia pendidikan/ Filantropi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup		Jumlah laporan kegiatan penghargaan hari lingkungan hidup sedunia (ikut serta dalam kegiatan hari lingkungan hidup sedunia di Jakarta)	1 lap	Rp 200,000,000	
	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP		Terlaksananya penanganan pengaduan lingkungan hidup		Rp 10,000,000	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP		Terlaksananya penanganan pengaduan lingkungan hidup	12 pengaduan	Rp 10,000,000	
	<i>Penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) Kabupaten/ Kota</i>		<i>Persentasi penyelesaian pengaduan masyarakat</i>		<i>Rp 10,000,000</i>	<i>Penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) Kabupaten/ Kota</i>		<i>Persentasi penyelesaian pengaduan masyarakat</i>	<i>100%</i>	<i>Rp 10,000,000</i>	

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Program (Akhir Periode RPJMD)	Target Capaian Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPd Tahun Berjalan	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan	
					Target RKPd Tahun 2018	Realisasi RKPd Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2019	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2020 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/5)	9	10=(5+7+9)	11
1	URUSAN WAJIB									
1 08	URUSAN WAJIB LINGKUNGAN									
1 08 01	DINAS LINGKUNGAN HIDUP									
1 08 01 15	Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan		Peningkatnya Sistem Pengelolaan Sampah Secara Terpadu dan Partisipatif							
1 08 01 15 02	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	Tersedianya fasilitas penunjang kinerja pengelolaan persampahan		-	-	-	-	5 Unit	5 unit	100.00%
1 08 01 15 04	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	Meningkatnya kinerja dan operasional persampahan di Kabupaten Minahasa		1 kegiatan	1 tahun	1 tahun	100.00%	1 tahun	1 Tahun	100.00%
1 08 01 15 06	Bimbingan Teknis Persampahan	Tersedianya sumber daya manusia dalam operasional bank Sampah		-	-	-	-	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100.00%
1 08 01 15 07	Peningkatan Kemampuan Aparat Pengelolaan Persampahan	Meningkatnya kemampuan aparatur pengelolaan persampahan		10 ASN	14 orang	14 orang	100.00%	-	-	-
1 08 01 15 13	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan (DAK)	Meningkatnya kinerja dan operasional persampahan di Kabupaten Minahasa		-	-	-	-	1 Unit	1 Unit	100.00%
1 08 01 15 15	Perencanaan Pengadaan Tanah Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Tondano	Terwujudnya pembangunan tempat pengolahan akhir sampah		-	1 paket	1 paket	100.00%	-	1 paket	100.00%
1 08 01 15 17	Pengadaan Tanah Tempat Pembuangan Akhir (TPA)	Terdsapat Tempat Pembuangan Akhir yang baik dan memadai		-	1 lahan	1 lahan	100.00%	-	1 lahan	-
1 08 01 15 20	Pengadaan Gedung Bangunan Bank Sampah di Tondano	Terbangunnya lokasi bank sampah yang memadai		-	1 paket	1 paket	100.00%	-	1 paket	100.00%
1 08 01 15 21	Pengadaan Gedung Bangunan Bank Sampah di Kawangkoan	Terbangunnya lokasi bank sampah yang memadai		-	1 paket	1 paket	100.00%	-	1 paket	100.00%
1 08 01 15 22	Pengadaan Motor Sampah Roda Tiga Sampah di Kawangkoan	Tersedianya fasilitas penunjang kinerja pengelolaan persampahan		-	6 Unit	6 Unit	100.00%	-	6 Unit	100.00%
1 08 01 15 23	Pengadaan Mesin pemilah Sampah	Terlaksananya pengelolaan persampahan yang memadai		-	2 Unit	2 Unit	100.00%	-	2 Unit	100.00%
1 08 01 16	Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup		Menimngkatnya Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup							
1 08 01 16 03	Pemantauan kualitas lingkungan hidup	Tersedianya data lingkungan hidup yang baik dan benar		-	2 dokumen	2 dokumen	100.00%	-	2 dokumen	100.00%
1 08 01 16 04	Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup	Terlaksananya pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup		1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100.00%	-	2 kegiatan	100.00%
1 08 01 16 14	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup	Terciptanya peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup		-	1 Kegiatan		100.00%	-	2 kegiatan	100.00%
1 08 01 17	Perlindungan dan Konservasi SDA		Peningkatan Perlindungan dan Konservasi SDA							
1 08 01 17 01	Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-sumber Air	Terlaksananya kegiatan konservasi SDA dan pengendalian kerusakan sumber-sumber air		1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100.00%	1 Kegiatan	3 Kegiatan	100.00%

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Program (Akhir Periode RPJMD)	Target Capaian Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan	
					Target RKPD Tahun 2018	Realisasi RKPD Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2019	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2020 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/5)	9	10=(5+7+9)	11
1 08 01 05 01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Terciptanya ASN yang handal dan profesional		-	5 ASN	1 ASN	20.00%	-	-	-
1 08 01 06	Peningkatan Pengembangan Sistem pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan		Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan							
1 08 01 06 01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisari realisasi kinerja SKPD	Terselenggaranya sistem pelaporan yang baik		1 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100.00%	2 dokumen	5 Dokumen	100.00%



LAMPIRAN 3

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN SKPD
KABUPATEN MINAHASA

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD (%)				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun tahun n-1 2016	Tahun tahun n 2017	Tahun tahun n+1 2019	Tahun tahun n+1 2020	Tahun tahun n-1 2016	Tahun tahun n 2017	Tahun tahun n+1 2019	Tahun tahun n+1 2020	
1	2	3	4	6	7			9	10	11	11	12
1	Persentase Penanganan Sampah		Vol. Sampah yang ditangani (m3) / Volume Produksi Sampah (m3) X 100 %	90	100	100	100	82.63	90	100	100	
2	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL		Jumlah perusahaan wajib AMDAL yang diawasi / Jumlah seluruh perusahaan wajib AMDAL X 100%	90	100	100	100	100	90	100	100	
3	Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk		Jumlah daya tampung (m3) / Jumlah penduduk X 100 %	90	100	100	100	0.208	90	100	100	
4	Pengelolaan Limbah B3		Jumlah ijin yang dikeluarkan / Jumlah perusahaan yang wajib memiliki ijin X 100%	90	100	100	100	0	90	100	100	
5	Pengelolaan limbah B3 yang diawasi		Jumlah pengawasan terhadap pengelolaan B3 / jumlah data kegiatan yang memiliki ijin X 100%	90	100	100	100	100	90	100	100	
6	Penegakan hukum lingkungan		Jumlah kasus lingkungan yang ditangani / jumlah kasus lingkungan yang harus ditangani X 100%	90	100	100	100	100	90	100	100	

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD (%)				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun tahun n-1 2016	Tahun tahun n 2017	Tahun tahun n+1 2019	Tahun tahun n+1 2020	Tahun tahun n-1 2016	Tahun tahun n 2017	Tahun tahun n+1 2019	Tahun tahun n+1 2020	
1	2	3	4	6	7			9	10	11	11	12
7	Pengelolaan kualitas air (Penetapan kelas Air)		Jumlah sungai yang telah ditetapkan kelas air / Jumlah sungai yang wajib ditetapkan kelas airnya X 100%	90	100	100	100	100	90	100	100	
8	Pengendalian potensi sumber pencemaran air		jumlah beban pencemaran air yang telah dikendalikan / Jumlah beban pencemaran air yang dihasilkan X 100%	90	100	100	100	100	90	100	100	
9	Sampling pemantauan kualitas air sungai dan/danau secara berkala pada periode musim hujan dan kemarau		Jumlah titik pengambilan sampling / Jumlah titik pemantauan rutin yang ditetapkan X 100%	90	100	100	100	100	90	100	100	
10	Pelaksanaan penetapan status mutu air		Jumlah titik &/danau yang telah ditetapkan statusnya / jumlah sungai dan/danau X 100%	90	100	100	100	100	90	100	100	

LAMPIRAN 4

USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2021
KABUPATEN MINAHASA

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
A	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup				
1	Koordinasi Penilaian Kota Sehat / Adipura	Tondano	Ikut Serta dalam Program Penilaian Adipura		
			Pembenahan Sarana Prasarana Fisik Perkotaan, yaitu:		
			- Pengadaan dan Penanaman Bibit Pohon Peneduh	1 Paket	
			- Pembangunan Taman Kota	1 lokasi	
2	Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup	Kab Minahasa	Terlaksananya Pengkajian Dampak Lingkungan Untuk Setiap Kegiatan Wajib AMDAL (Penyusunan UKL dan UPL)		
			- Pendataan Kegiatan Wajib Dokumen Pengolahan Lingkungan	1 Tahun	
			- Pengawasan Ijin Usaha dan/atau Kegiatan	10 Ijin	
3	Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber- Sumber Air	Kab Minahasa	Terlaksananya Pengendalian Kerusakan Sumber-sumber Air (Pengendalian Eceng Gondok dan Gulma Air)		

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
			- Pemetaan Sebaran Eceng Gondok dan Gulma Air	1 Paket Dokumen	
			- Pengendalian / Pengangkatan Eceng Gondok dan Gulma Air	1 Tahun	
4	Peningkatan Konservasi Daerah Tangkapan Air dan Sumber-sumber Air	Kab Minahasa	Terlaksananya Gerakan Penhijauan di Daerah Tangkapan Hujan dan Sumber-sumber Air - Penanaman Pohon di Seputaran Danau dan DAS Tondano	Paket	
B	Program Pengelolaan Persampahan		Meningkatnya Sistem Pengelolaan Sampah Secara Terpadu dan Partisipatif		
1	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	Kab Minahasa	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan - Truck Sampah/Truck Amroll - Motor Sampah - Tong Sampah - Kontainer Sampah - TPA	10 Unit 10 Unit 50 Unit 10 Unit 2 Lokasi	

Lampiran 5

Rancangan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Kabupaten Minahasa

Dinas Lingkungan Hidup

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	RENJA Perubahan Tahun 2021			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7
I	Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar					
2.11	Bidang Lingkungan Hidup					
2.11.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentasi Kepuasan Stakeholder terhadap pelayanan penunjang urusan perangkat daerah		100%	Rp 3,522,045,064	APBD
2.11.01.2.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya perencanaan serta evaluasi kinerja perangkat daerah		1 dok	Rp 1,999,666	APBD
2.11.01.2.01.06	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtislar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtislar realisasi kinerja PD	Minahasa	1 dok	Rp 1,999,666	APBD
2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentasi pengelolaan keuangan daerah		100%	Rp 2,746,552,788	APBD
2.11.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan penyediaan gaji dan tunjangan ASN DLH	Minahasa	14 Bln	Rp 2,741,559,010	APBD
2.11.01.2.02.05	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan/berita acara hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun	Minahasa	1 lap	Rp 998,610	APBD
2.11.01.2.02.06	Pengelolaan dan penyiapan tanggapan bahan pemeriksaan	Jumlah rancangan laporan tanggapan pemeriksaan	Minahasa	1 dok	Rp 997,867	APBD
2.11.01.2.02.07	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/ semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/triwulan/ Semesteran	Minahasa	17 lap	Rp 1,997,811	APBD
2.11.01.2.02.08	Penyusunan laporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	Jumlah rancangan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran yang disusun	Minahasa	2 lap	Rp 999,490	APBD
2.11.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentasi disiplin ASN DLH meningkat		100%	Rp 44,340,900	APBD
2.11.01.2.05.02	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta atribut perlengkapannya yang diadakan (pakaian olah raga dan PDH)	Minahasa	27 stel	Rp 25,074,900	APBD
2.11.01.2.05.09	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti diklat sesuai tugas dan fungsi	Minahasa	3 ASN	Rp 19,266,000	APBD
2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan dan pengelolaan administrasi umum PD		100%	Rp 188,161,095	APBD

2.11.01.2.06.02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor (ATK)	Minahasa	1 paket	Rp	29,999,596	APBD
2.11.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	Minahasa	1 paket	Rp	17,974,737	APBD
2.11.01.2.06.05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	Minahasa	1 paket	Rp	34,356,762	APBD
2.11.01.2.06.08	Fasilitas kunjungan tamu	Jumlah tamu yang terfasilitasi	Minahasa	54 orang	Rp	6,534,000	APBD
2.11.01.2.06.09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi	Jumlah laporan rapat koordinasi dan konsultasi	LD	5 laporan	Rp	99,296,000	APBD
2.11.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintah Daerah	Persentasi pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah		100%	Rp	104,365,800	APBD
2.11.01.2.07.06	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin (PC, Laptop, Printer, TV, Dispencer dll)	Minahasa	14 unit	Rp	104,365,800	APBD
2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah		12 bln	Rp	236,594,815	APBD
2.11.01.2.08.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Minahasa	12 bulan	Rp	34,994,815	APBD
2.11.01.2.08.04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah bulan jasa pelayanan umum kantor (THL)	Minahasa	12 bulan	Rp	201,600,000	APBD
2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Minahasa	27 unit	Rp	200,030,000	APBD
2.11.01.2.09.01	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah kendaraan dinas jabatan	Minahasa	1 unit	Rp	38,480,000	APBD
2.11.01.2.09.02	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan perorangan kendaraan dinas operasional dan lapangan	Jumlah kendaraan dinas dan operasional yang dilakukan pembayaran pajak	Minahasa	2 unit	Rp	33,930,000	APBD
2.11.01.2.09.06	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	jumlah peralatan dan mesin yang terpelihara	Minahasa	24 unit	Rp	29,876,000	APBD
2.11.01.2.09.09	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara dan direhabilitasi	Minahasa	1 unit	Rp	97,744,000	
II	Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar						
2.11	Urusan Pemerintahan di Bidang Lingkungan Hidup				Rp	13,963,357,549	APBD
2.11.02	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentasi Dokumen lingkungan hidup yang disusun		100%	Rp	724,993,880	
2.11.02.2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	Terlaksananya penyusunan Dokumen Lingkungan hidup dan dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	Minahasa	3 dok	Rp	724,993,880	

2.11.02.2.02.02	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD	Minahasa	1 dok	Rp	74,997,960	
2.11.02.2.02.03	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Untuk KRP Yang Berpotensi menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen KLHS untuk KRP	Minahasa	3 dok	Rp	649,995,920	
2.11.02	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)		60,11%	Rp	6,508,654,862	APBD
2.11.02.2.01	Pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Terukurnya kualitas air, udara dan tanah/ tutupan lahan	Minahasa	3 komponen	Rp	60,000,000	APBD
2.11.02.2.01.01	Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pencegahan pencemaran lingkungan hidup dilaksanakan terhadap media tanah, air, udara dan laut	Pengukuran kualitas air, udara, tutupan lahan/tanah	Minahasa	9 lokasi	Rp	60,000,000	APBD
2.11.02.2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan sumber pencemar	Jumlah sumber pencemar yang tertangani	Minahasa	4 lokasi	Rp	6,428,693,900	APBD
2.11.02.2.02.03	Penghentian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Pengendalian gulma air (eceng gondok) di Danau Tondano dan sumber-sumber air lainnya	Minahasa	4 lokasi	Rp	6,428,693,900	APBD
2.11.02.2.03	Pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Terlaksananya pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Minahasa	10 kegiatan	Rp	19,960,962	APBD
2.11.02.2.03.01	Koordinasi dan sinkronisasi penghentian sumber pencemar	Jumlah Koordinasi dan sinkronisasi penghentian sumber pencemar (perjalanan dinas DD)	Minahasa	10 laporan	Rp	19,960,962	APBD
2.11.05	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3)	Terlaksananya penerbitan izin B dan LB33	Minahasa	10 kegiatan	Rp	9,994,950	APBD
2.11.05.2.01	Penyimpanan sementara limbah B3	Jumlah Kegiatan yang memiliki ijin B3	Minahasa	10 kegiatan	Rp	9,994,950	APBD
2.11.05.2.01.02	Verifikasi lapangan untuk memastikan pemenuhan persyaratan administrasi dan teknis penyimpanan sementara limbah B3	Jumlah laporan verifikasi lapangan (Perjalanan dinas DD)	Minahasa	10 laporan	Rp	9,994,950	APBD
2.11.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Terlaksananya pembinaan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin PPLH	Minahasa	27 kegiatan	Rp	39,996,747	APBD
2.11.06.2.01	Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan /atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah usaha dan kegiatan yang dilakukan pembinaan dan pengawasan	Minahasa	27 usaha	Rp	39,996,747	APBD

2.11.06.2.01.03	Pengawasan usaha dan /atau kegiatan yang izin lingkungan hidup, izin PPLH yang diterbitkan oleh pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pengawasan yang dilaksanakan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan (Perjalanan dinas DD)	Minahasa	27 laporan	Rp	39,996,747	APBD
2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Terlaksananya Diklat dan Penyuluhan Lingkungan Hidup	Minahasa	2 klmpk	Rp	9,994,950	APBD
<i>2.11.08.2.01</i>	<i>Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat daerah Kabupaten/ Kota</i>	<i>Jumlah Diklat dan Sosialisasi serta pendampingan bagi kelompok masyarakat</i>	<i>Minahasa</i>	<i>2 klmpk</i>	<i>Rp</i>	<i>9,994,950</i>	<i>APBD</i>
2.11.08.2.01.02	Pendampingan gerakan peduli lingkungan hidup	Jumlah Kelompok masyarakat (Klmpk Bank Sampah)	Minahasa	2 klmpk	Rp	9,994,950	APBD
2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Tercapainya penghargaan lingkungan hidup	Minahasa	1 keg	Rp	49,999,804	APBD
<i>2.11.09.2.01</i>	<i>Pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah Kegiatan</i>	<i>Minahasa</i>	<i>1 keg</i>	<i>Rp</i>	<i>49,999,804</i>	<i>APBD</i>
2.11.09.2.01.01	Penilaian kinerja masyarakat/ Lembaga masyarakat/ Dunia usaha/ Dunia pendidikan/ Filantropi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Jumlah laporan kegiatan penghargaan hari lingkungan hidup sedunia (Ikut serta dalam kegiatan hari lingkungan hidup sedunia di jakarta)	Minahasa	1 laporan	Rp	49,999,804	APBD
2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Terlaksananya penanganan pengaduan Lingkungan Hidup	Minahasa	6 pengaduan	Rp	9,998,272	APBD
<i>2.11.10.2.01</i>	<i>Penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) Kabupaten/ Kota</i>	<i>Persentasi penyelesaian pengaduan masyarakat</i>	<i>Minahasa</i>	<i>100%</i>	<i>Rp</i>	<i>9,998,272</i>	<i>APBD</i>
2.11.10.2.01.01	Pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/ Kota	Jumlah laporan pengaduan yang diselesaikan (Perjalanan dinas DD)	Minahasa	6 pengaduan	Rp	9,998,272	APBD
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentasi penanganan, pengurangan dan pengangkutan sampah	Minahasa	100%	Rp	6,609,724,084	APBD
<i>2.11.11.2.01</i>	<i>Pengelolaan sampah</i>	<i>Persentasi Pengelolaan sampah</i>	<i>Minahasa</i>	<i>100%</i>	<i>Rp</i>	<i>6,599,729,134</i>	<i>APBD</i>
2.11.11.2.01.03	Penanganan sampah dengan melakukan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST/ SPA Kabupaten/Kota	Volume timbulan sampah yang tertangani	Minahasa	67,810 ton/thn	Rp	6,599,729,134	APBD

2.11.11.2.03	<i>Pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh pihak swasta</i>	<i>Jumlah pembinaan dan pengawasan</i>	<i>Minahasa</i>	<i>10 lokasi</i>	<i>Rp</i>	<i>9,994,950</i>	<i>APBD</i>
2.11.11.2.03.03	<i>Pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh pihak swasta</i>	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi (Perjalanan dinas DD)	Minahasa	10 laporan	Rp	9,994,950	APBD
Jumlah Total					Rp	17,485,402,613	